

Persoalan Kerawanan Pangan pada Masyarakat Miskin di Wilayah Perbatasan Entikong (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat

Food Security at Low-Income Community in the Border Region of Entikong (Indonesia-Malaysia) West Kalimantan

Atem¹, Nikodemus Niko²

^{1,2}Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

¹atemkornadi@gmail.com, ²nikodemusn@outlook.com

Riwayat Artikel: Dikirim 20 Oktober 2019; Diterima 15 Mei 2020; Diterbitkan 20 Mei 2020

Abstrak

Isu ketahanan pangan sudah sejak lama berkembang, baik di kalangan masyarakat internasional maupun masyarakat nasional di Indonesia. Pada beberapa proses dan bentuk ketahanan pangan nasional, pemerintah menggalakkan pengembangan masyarakat berbasis pangan lokal. Pada masyarakat di Entikong pelaksanaan program ini masih belum terlihat sebagai keadaan yang berarti dalam penanganan persoalan pangan di perbatasan negara. Pada faktanya masyarakat perbatasan masih ketergantungan pangan terhadap Malaysia. Ide untuk menjadikan masyarakat Indonesia swasembada pangan memang sudah lama menjadi sektor penting yang menjadi perhatian khusus pemerintah. Sehingga banyak program pemberdayaan yang terdapat di masyarakat yang menjadi titik temu dalam mengatasi kerawanan pangan, terlebih adalah menjadi jalan baru bagi masyarakat perbatasan keluar dari zona miskin. Metode yang digunakan adalah deskriptif eksploratif yang mana sumber data berasal dari data primer yang merujuk langsung pada situasi masyarakat perbatasan Entikong, sedangkan data sekunder dari hasil desk review terkait potensi dan keadaan pangan masyarakat di wilayah perbatasan Entikong. Temuan dalam makalah ini yaitu bahwa perbatasan Entikong memiliki potensi yang mumpuni untuk menjadi pusat perekonomian, dengan lokasi strategis, serta dukungan akses formal yang baik. Namun, keadaan ini tidak merata, pada faktanya masih terdapat wilayah desa-desa yang terisolir dan keterbatasan akses. Kemudian, pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) di perbatasan menjadi angin segar bagi Entikong dalam berkembang pesat dan menjadikan Entikong sebagai sentra aktivitas dan pembangunan ekonomi, termasuk didalamnya adalah sentra pangan bagi wilayah Indonesia dan sebagian wilayah Malaysia.

Kata kunci: kerawanan pangan, masyarakat miskin, perbatasan

Abstract

The issue of food security has long since developed, both among the international community and national communities in Indonesia. In some processes and forms of national food security, the Government encourages the development of local food-based communities. In the community in Entikong, the implementation of this program is still not seen as an exact condition in the handling of food issues at the borders of the country. Border society is still food dependence on Malaysia. The idea of making Indonesian society self-sufficiency in food has long been a crucial sector of individual attention to the Government. Many empowerment programs are found in the community that is the meeting point for overcoming food insecurity, so it is a new way for the border community out of the inferior zone. The method used is a descriptive exploratory where the source of the data comes from the primary data referring directly to the situation of the border society of Entikong, while the secondary data of the desk review results related to the potential and state of the food community In the Entikong border area. The findings in this paper are that Entikong has economic potential, strategic location, and formal access support that has been qualified to advance. However, this situation is uneven; there are still areas of isolated villages and limited access. Then, the construction of international Terminal Goods (TBI) on the border became a breath of fresh air for the Entikong to multiply and make Entikong as the center of activity and economic development, including the food Center for the region Indonesia and as part of Malaysia.

Keywords: food Security, low-income community, border region

PENDAHULUAN

Krisis pangan di Indonesia sudah lama dirasakan oleh masyarakat, produk pertanian, peternakan hingga industri lokal mengalami kenaikan harga setiap tahun. Pada awal tahun 2016, pemerintah mengakui kemerosotan pangan di Indonesia, dengan melambungnya harga pangan di pasaran. Hari ini, isu ketahanan pangan menjadi isu krusial dalam mencari penanganan tepat mengenai krisis ini di Indonesia. Swasembada pangan sudah mulai digalakkan pemerintah sejak pertengahan tahun 1980-an. Alhasil pada kenyataannya Indonesia tidak mampu mencukupi sendiri kebutuhan pangan dalam negeri, dan memaksa untuk impor dari negara lain.

Ketahanan pangan nasional saat ini cukup menyita perhatian karena pada tingkat nasional masih belum mencapai kata 'ketahanan'. Hal ini ditandai dengan negara Indonesia masih impor beras, jagung dan pangan pokok lainnya dari negara lain seperti Vietnam dan Thailand. Kemudian, data GHI (*Global Hunger Index*) tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam kategori *serious*, yang artinya bahwa tingkat kelaparan di Indonesia serius untuk ditangani.

Harga pangan lokal pun tidak seimbang dengan kondisi masyarakat menengah ke bawah, karena hasil pangan di hasilkan masyarakat pedesaan yang notabene kehidupannya termasuk dalam golongan ekonomi menengah ke bawah. Pada level nasional ketahanan pangan masih menjadi persoalan yang seakan tidak ada solusi efektif untuk mengatasinya. Namun berbeda dengan level lokal seperti di pedesaan yang notabene masyarakatnya bertani sebagai sumber penghasilan utama. Sehingga masyarakat dapat *survive* dengan hasil alam yang mereka usahakan, termasuk bertani.

Winarno (2010) menyebutkan bahwa negara kita terus menjadi negara pengimpor terbesar pangan dunia selama satu dekade lebih sejak rezim reformasi.

Krisis pangan global ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara-negara maju lainnya, dimana hal ini membutuhkan penanganan serius oleh semua stakeholder, baik di dunia internasional, nasional dan daerah.

FAO (*Food and Agriculture Organization*) pernah menggelar *press release* bersama dengan WFP (*World Food Programme*) pada tahun 2010 yang mengemukakan bahwa pada tahun tersebut terdapat 925 juta jiwa penduduk dunia yang menderita kelaparan. Situasi ini semakin parah karena selama 20 tahun terakhir investasi pada sektor pertanian berkurang drastik, padahal lapangan kerja di sektor pertanian terdapat sekitar 70% (Suharyanto, 2011).

Gagasan alternatif untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional bukan saja penting melainkan semestinya sudah menjadi gerakan nasional yang masive. Sehingga kualitas hidup masyarakat pada tingkat lokal, nasional dan dunia dapat terjamin. Ketahanan pangan bukan saja persoalan menghasilkan padi atau beras kemudian dapat menjadi konsumsi sebagai nasi. Tetapi lebih luas ketahanan pangan mencakup bagaimana masyarakat pada level lokal maupun nasional dapat menghasilkan selain padi atau beras seperti misalnya jagung, umbi-umbian, singkong, sagu, dan lain sebagainya. Harapan inilah yang menjadi acuan ketahanan pangan nasional. Pada level lokal, tergantung pada wilayah dimana masyarakat itu bermukim. Misalnya masyarakat di Papua yang sudah turun temurun menghasilkan sagu sebagai bahan makanan utama.

Visi Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 2015-2019—dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan—yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI yaitu menurunkan kerawanan pangan yang basisnya pada sumber daya lokal dan mewujudkan ketersediaan pangan.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Radiansyah (dalam Hermanto, 2015) bahwa pengembangan pangan lokal saat ini menghadapi tantangan serius seperti: (1) harus adanya program yang memberi dampak positif bagi keanekaragaman hayati, (2) melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya genetik secara berkelanjutan, (3) harus memberi manfaat secara adil dan merata dari hasil pemanfaatan sumber daya genetik.

Redefinisi Ketahanan Pangan Nasional

Definisi ketahanan pangan (*food security*) dapat berubah dalam tiap konteks, baik di level dunia maupun nasional. Setidaknya terdapat lebih dari 200 definisi ketahanan pangan (Maxwell, 1994) dan tidak kurang dari 450 indikator ketahanan pangan (Hoddinott, dalam Prabowo, 2010).

Sejak penyelenggaraan konferensi pangan dunia pada tahun 1974 hingga sekitar tahun 1994, Maxwell mengamati (1994) perubahan-perubahan yang terjadi tentang pendefinisian ketahanan pangan, dia juga menyebutkan setidaknya 3 perubahan penting yang terjadi yakni; 1) adanya perubahan dari tingkat global dan nasional ke tingkat rumah tangga (*household*) dan individu (*individual*); 2) perspektif pangan sebagai kebutuhan dasar (*food first perspective*) berubah menjadi perspektif penghidupan (*livelihood perspective*); 3) perubahan indikator yang objektif (*objective indicators*) ke persepsi yang subjektif (*subjective perception*).

Dalam undang-undang (UU) No. 7 tahun 1996 ketahanan pangan didefinisikan sebagai “kondisi dimana terjadi kecukupan penyediaan pangan bagi rumah tangga yang diukur dari ketercukupan pangan dalam jumlah dan kualitas dan juga adanya jaminan atas keamanan (*safety*), distribusi yang merata, dan kemampuan membeli.” UU ketahanan pangan kemudian dipertegas dalam PP No. 68 tahun 2002 dimana ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga dengan ketersediaan pangan yang aman, dan merata serta cukup dari segi jumlah

dan mutunya (Winarno, 2014).

Jika dilihat dari aspek pola konsumsi, masyarakat Indonesia memiliki pola konsumsi utama ialah beras, sama dengan negara-negara Malaysia, Thailand, Vietnam, Taiwan, Singapura, Korea Selatan maupun Jepang, namun Indonesia tidak mengikuti jejak beberapa negara tersebut dimana pendapatan perkapita negara Malaysia, Thailand, Taiwan, Singapura, Korea Selatan dan Jepang yang relatif tinggi turut mempengaruhi kecenderungan konsumsi beras di negara tersebut yang mulai mengalami penurunan dan digantikan dengan gandum (Khudori, 2008).

Pengurangan ketergantungan masyarakat terhadap beras inilah yang sedang digalakkan pada program pemerintah untuk menginisiasi ketahanan pangan nasional. Namun tidak mudah menghilangkan ketergantungan tersebut, terutama bagi masyarakat miskin yang tinggal di wilayah perkotaan. Kecenderungan mengkonsumsi nasi tidak bisa diminimalisir. Ketergantungan inilah yang mengharuskan pemerintah impor beras dari negara lain, karena pasokan beras nasional belum mumpuni untuk menjadi sumber ketahanan pangan nasional. Oleh karenanya swasembada pangan lokal diharapkan mampu menjawab persoalan krisis pangan nasional di masa mendatang.

Sejak masa kolonial kebijakan harga beras merupakan basis dari kebijakan pangan. Untuk menekan harga beras dan tenaga kerja murah, pemerintah kolonial Belanda memberi investasi di bidang pertanian (Mears dan Moeliono dalam Lassa, 2005). Kemudian, dalam politik Soekarno yang menerapkan kebijakan imbalan beras bagi PNS dan militer agar mendukungnya di pemerintahan. Hanya saja politik tersebut justru membuat ketidakstabilan ekonomi nasional. Pada tahun 1965 situasi beras nasional berada pada titik keterpurukan. Gudang beras di Jawa hanya memproduksi 2% diatas produksi tahun 1945 atau setara dengan produksi

sebelum perang Dunia II (Mears dan Moeljono dalam Lassa, 2005; Khudori, 2008).

Tidak jauh berbeda dengan kebijakan Soekarno, rezim Soeharto mengambil jalan yang sama, setidaknya selama 32 tahun rezim Soeharto, dukungan beras yang diberikan kepada PNS dan militer. Kala itu, beras tidak hanya sebagai indikator ekonomi pembangunan, namun juga menjadi alat politik. Masa rezim pemerintahan yang panjang Soeharto telah mengadopsi revolusi hijau dan sempat berhasil mengantarkan Indonesia pada prestasi yang membanggakan dimana keluar dari negara pengimpor beras terbesar di dunia, bahkan pada tahun 1984 organisasi pangan dunia PBB (FAO) memberikan penghargaan kepada Indonesia atas capaian tersebut.

Kejayaan Indonesia dalam berswasembada beras ternyata tidak berlangsung lama setelah tahun 1984. Indonesia kembali mengalami fase sebelum revolusi hijau, peningkatan impor beras terjadi setiap tahunnya, jika pada tahun 1965 persentase impor mencapai 819.000 ton dari total suplai 8,8 juta ton beras dan pada tahun 1998 melonjak 7,1 juta ton dari total suplai 118 juta ton beras (Mears dan Moeljono dalam Lassa, 2005; Khudori, 2008).

Arah Kebijakan Pangan: Level Nasional ke Lokal

Pada era roformasi yakni masa transisi dimana setelah runtuhnya pemerintahan soeharto, kebijakan pangan tidak mengalami perubahan yakni masih bertapak pada kebijakan swasembada beras. Di era reformasi kepemimpinan Indonesia dari Habibi, A. Wahid hingga Megawati, dengan kebijakan yang serupa tersebut Indonesia memiliki nasib yang sama, tidak mampu mencapai ketahanan pangan yang memadai. Kebijakan yang sedikit berbeda muncul pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yakni adanya kebijakan “revitalisasi pertanian”

yang memiliki komitmen dalam meningkatkan pendapatan pertanian untuk GDP dan membangun agribisnis yang mampu menyerap tenaga kerja, dimana tujuan dari kebijakan ini tidak hanya pada swasembada beras melainkan juga swasembada jagung dan palawija (Lassa, 2005).

Melanjutkan kebijakan SBY, di era presiden Joko Widodo mencoba kembali menguatkan program Swasembada beras bersamaan dengan diversifikasi/peanekaragaman pangan, dengan kata lain mewujudkan swasembada pangan dalam arti luas (Sulaiman, dkk., 2018). Mendukung kebijakan tersebut, program Nawacita yang diusung pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla mengarahkan pembangunan pertanian sebagai agenda prioritas dalam rangka kedaulatan pangan Indonesia, dengan komitmen bangsa yang mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat dengan penguatan pembangunan dari daerah-daerah yang pada masa-masa pemerintahan sebelumnya tidak banyak tersentuh. Kebijakan ini selaras dengan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 Kementerian Pertanian dengan pelaksanaan program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2019).

Berdasarkan hasil pertemuan *Global Food Security Index* ada tahun 2017 lalu, yang membandingkan ketahanan negara berdasarkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, serta kualitas dan keamanan pangan menunjukkan posisi Indonesia berada di peringkat 69 dari 113 negara, kemudian dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU). Situasi ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 yang berada pada peringkat 71, sedangkan menurut *Rice Bowl Index* (RBI) di tahun yang sama Indonesia berada pada peringkat 10 dari 15 negara di Asia Pasifik.

Peringkat pangan global ini tentu saja *challenge* bagi tiap negara dalam menghadapi krisis pangan bersifat multidimensi sehingga memerlukan penilaian secara komprehensif dengan ukuran dan berbagai indikator (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2018). Satu hal yang pasti bahwa situasi pangan nasional kita saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja, berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah selama ini masih belum mencapai titik dimana Indonesia memiliki stabilitas ketahanan pangan seperti negara tetangga Malaysia, Singapura ataupun Thailand.

Kebutuhan pangan Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar tentu saja memerlukan pasokan pangan yang terus meningkat, sementara itu kapasitas Indonesia dalam memproduksi pangan cenderung menurun karena berbagai faktor, mulai dari keterbatasan lahan pertanian, berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian, penurunan kesuburan tanah dan perubahan iklim global sehingga berdampak pula pada pasokan pangan dunia yang semakin langka dan terbatas. Kelangkaan pangan di pasar dunia merupakan konsekuensi dari pasar pangan dunia yang bersifat residual (Sulaiman, dkk., 2018).

Pasar pangan dunia sangat rentan mengalami guncangan karena bersifat residual terutama apabila negara-negara eksportir (pemasok) dan negara importir (permintaan) mengalami perubahan kebijakan. Indonesia dengan jumlah penduduk yang sudah lebih dari 260 juta jiwa tentu saja memerlukan pangan dalam jumlah besar, dan sangat beresiko apabila Indonesia menggantungkan pasokan pangan pada pasar pangan dunia, hal ini dapat mengancam ketahanan pangan negara dan ketergantungan pangan terhadap pasar pangan dunia membuat Indonesia akan kehilangan kedaulatan ekonomi maupun politik di mata dunia internasional (Sulaiman, dkk., 2018)

Berakhirnya tujuan pembangunan Milinium (*Millennium Development Goals/MDGs*) pada tahun 2015 lalu masih menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi negara Indonesia. Saat ini kita sudah memasuki fase pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang masih berlangsung hingga tahun 2030 mendatang. Prioritas dari tujuan pembangunan baik MDGs maupun SDGs masih tidak terlepas dari pengentasan kemiskinan. Pemerintah Indonesia sendiri mencanangkan tujuan dalam agenda SDGs di Indonesia yakni pemerintah Indonesia berkomitmen kuat dalam penghapusan segala bentuk kemiskinan selama 15 tahun ke depan. Artinya target yang ingin dicapai tahun 2030 adalah kemiskinan di Indonesia berkurang drastis. Komitmen ini mensyaratkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas aksesibilitas pelayanan dasar dan hak hidup layak (Badan Pusat Statistik, 2016).

Pada level lokal, masyarakat pedesaan sudah menerapkan sistem swasembada sejak lama. Namun, keterbatasan sumber daya manusia yang kurang, menjadikan masyarakat lokal belum mampu *me-manage* hasil tani. Padahal sumber pangan lokal merupakan potensi baik untuk menjadi sumber ketahanan pangan di level nasional.

Masyarakat lokal hanya menjadikan hasil tani mereka sebagai sumber penghidupan sehari-hari (*subsisten*), sehingga dapat dilihat bahwa masyarakat lokal tidak kekurangan pangan. Sejak lama pemberdayaan petani lokal sudah digalakkan, namun hasil yang diharapkan belum menjadi tolok ukur utama dalam menjawab persoalan pangan nasional. Pulau Jawa yang dijadikan lumbung padi nasional menjadi sentral program pemerintah, sehingga potensi-potensi di wilayah lokal lain seperti di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan wilayah lain kemudian belum dilirik secara menyeluruh.

Kelangkaan Pangan dan Ancaman bagi Ketahanan Pangan Global

Hari ini, umat manusia menghadapi ancaman serius kelangkaan pangan. Kelangkaan pangan ini berakibat pada persoalan-persoalan sosial dan politik yang serius, bahkan kelangkaan pangan juga mengancam keamanan global (*global security*) (winarno, 2014). Suhu perpolitikan di Indonesia yang akhir-akhir ini kurang stabil kemudian merambah ke dalam beberapa sektor, mulai dari ketidakstabilan harga pangan serta berpengaruh terhadap harga minyak nasional.

Isu pangan dan isu kemiskinan sangat erat berkaitan, dimana Indonesia yang merupakan negara dunia ketiga masih meningkat jumlah masyarakat miskin. Berdasarkan data, tercatat sebanyak 12.783.505 orang masyarakat Indonesia yang berada di garis kemiskinan dan mengalami kemiskinan ekstrim (*World Poverty Clock*, 2019). Masalah kemiskinan ini mengancam masyarakat kecil di pedesaan dan di perkotaan. Niko (2019) menyebutkan bahwa pada kemiskinan, kaum perempuan di pedesaan menjadi sangat rentan atas keparahan dan kesengsaraan.

Isu pangan penting dan erat keterkaitannya dengan kemiskinan di seluruh dunia (utamanya di negara dunia ketiga). Hal ini karena kemiskinan bukan hanya sebagai akibat dari proyek neoliberal (Winarno, 2014). Artinya bahwa isu pangan dan kemiskinan merupakan produk negara, dalam artian kedua isu global ini merupakan proyek negara yang menguntungkan bagi pihak penguasa namun menyengsarakan rakyat kecil.

Wilayah Entikong merupakan wilayah perbatasan negara Indonesia dengan Malaysia. Entikong merupakan wilayah subur akan pertanian dan perkebunan, sangat ironis jika disebut sebagai wilayah miskin pangan. Namun demikianlah kenyataannya, hasil kebun dan tani masyarakat lokal di Entikong di jual di wilayah negara Malaysia. Seharusnya

masyarakat lokal mapan secara pangan dan ekonomi sehingga terjadi pertukaran barang di pasar lintas batas. Niko & Samkamaria (2019) menyebutkan bahwa belum ada perubahan signifikan dari pembangunan Terminal Barang Internasional di Entikong.

Faktanya bahwa masyarakat lokal menjual hasil kebun dan tani bukan karena sudah mapan, melainkan sebaliknya harga kebutuhan pokok di wilayah Indonesia (Entikong) sangat tinggi dan sulit di jangkau masyarakat lokal. Hal ini yang menjadi titik masuk penulis dalam mengidentifikasi gambaran umum kerawanan pangan pada masyarakat miskin di wilayah perbatasan Entikong (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat.

METODE

Metode yang digunakan adalah deskriptif eksploratif yang mana sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Ciri dari jenis penelitian kualitatif dapat dilihat dengan jenis pendekatan ini menekankan pada penggalian, penjelasan, dan pendeskripsian pengetahuan secara etik, emik, dan holistik. Data primer didapatkan melalui wawancara dan pendapat aktor.

Creswell (2010) menyebutkan data penelitian kualitatif dapat berupa lisan dan tulisan. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui penelusuran tulisan-tulisan ilmiah seperti jurnal dan buku yang terkait dengan tema penelitian, serta sumber-sumber dokumen pemerintahan kecamatan dan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Situasi Sosial Ekonomi Masyarakat di Perbatasan Entikong

Masyarakat yang mendiami desa Suruh Tembawang adalah etnis Dayak Sungkung. Adat istiadat masih kental berlaku di desa ini. Kultur lokal yang masih hingga kini eksis satu diantaranya adalah gawai panen, yang merupakan upaya untuk mengikat hubungan kekeluargaan antar warga lokal.

Kemudian, *living low* juga masih kentara, seperti dalam penyelesaian suatu perkara yang terjadi di masyarakat. Contohnya tindakan yang melanggar norma sosial masyarakat pada umumnya diselesaikan dengan cara hukum adat, yang sifatnya berjenjang mulai dari pengurus adat, dan temenggung adat.

Masyarakat desa Suruh Tembawang umumnya adalah berasal dari ekonomi kelas menengah kebawah, hal ini dipengaruhi oleh keadaan geografis desa Suruh Tembawang berada jauh dari kota kecamatan, dengan akses yang sulit serta kawasan terisolir. Hal ini memicu sulitnya masyarakat menjangkau kota kecamatan Entikong untuk proses jual beli barang (aksesibilitas ekonomi).

Mata pencarian masyarakat desa Suruh Tembawang sebagian besar adalah petani kebun dan ladang, masyarakat memanfaatkan alam untuk menghasilkan pangan. Hasil pangan ini kemudian di jual ke wilayah Malaysia, dimana akan di tampung di kampung Sapit (wilayah Sarawak).

Mata pencarian penduduk di desa Suruh Tembawang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1:
Mata Pencarian Penduduk di Desa Suruh Tembawang Tahun 2017

No	Uraian	Jumlah
1	Petani/Pekebun	2794
2	PNS/TNI/Polri	31
3	Karyawan Swasta	53
4	Pegawai Honorer	42
5	Pedagang	82
6	Wiraswasta	96
	Jumlah	3.098

Sumber: Profil desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau tahun 2017

Kerawanan Pangan pada Masyarakat Miskin di Perbatasan Entikong

Kerawanan pangan ke depan bukan disebabkan oleh kekurangan produksi pangan, melainkan oleh faktor kemiskinan

(Wichelns, dalam Hermanto, 2015). Kemiskinan merupakan penyebab utama rendahnya daya beli masyarakat terhadap bahan pangan. Hal ini berkorelasi terhadap ketiadaan akses orang miskin dalam pemenuhan pangan yang cukup dan bergizi.

Masyarakat perbatasan Entikong merupakan masyarakat pedesaan yang pekerjaan utamanya adalah bertani. Hal ini tentu merupakan jalan baik untuk masyarakat perbatasan menekan stabilitas persediaan pangan lokal. Faktanya, laporan Badan Pusat Statistik (2018) menyebutkan bahwa Kalimantan Barat memiliki potensi atas kerawanan pangan di Indonesia. Situasi ini berkorelasi erat dengan banyaknya alih fungsi lahan yang bermula dari tanaman pangan menjadi areal perkebunan kelapa sawit.

Masyarakat pedesaan di Entikong berladang dengan sistem yang masih sederhana, sebagaimana budaya leluhur dan nenek moyang mereka jaman dahulu yang menerapkan sistem ladang berpindah. Masyarakat pedesaan yang mendiami wilayah perbatasan hampir 100% adalah etnis Dayak. Oleh karena itu hubungan sosio-kultural antara masyarakat perbatasan antar kedua negara ini sangat erat, mereka berasal dari etnis dan nenek moyang yang sama.

Pada saat kondisi penduduk di suatu negara tengah mengalami kelaparan atau terancam kondisi rawan pangan yang diistilahkan juga dengan *food insecurity* maka dapat dipastikan tidak lagi ada ditemukan kedamaian dan ketenangan dalam negara tersebut. Kesempatan bagi individu untuk melakukan akses terhadap pangan secara universal merupakan hak azasi sehingga setiap negara berkewajiban melindungi dan menghormati hak azasi warganya dari sisi ketahanan pangan.

Ketergantungan tinggi terhadap beras sebagai bahan pangan pokok membuat ancaman kondisi rawan pangan yang semakin parah di Indonesia. Santoso (2014) mengungkapkan fakta ancaman

rawan pangan yang kian parah pada rumah tangga miskin di pedesaan ternyata erat kaitannya dengan naiknya harga pangan. Apabila dikaitkan dengan kondisi saat ini, dimana beras mencapai harga di atas Rp.10.000 per kilogram, akan memaksa perubahan pola makan pada mayoritas rumah tangga miskin, misalnya dalam sehari tiga kali makan menjadi sehari dua kali atau satu kali makan.

Suharyanto (2011) menyebutkan bahwa sistem ketahanan pangan di Indonesia secara komprehensif meliputi empat sub-sistem, yaitu: (a) ketersediaan pangan yang cukup untuk seluruh penduduk, (b) distribusi pangan yang lancar dan merata, (c) konsumsi pangan yang memenuhi kecukupan gizi seimbang, (d) status gizi masyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut, sistem ketahanan pangan bukan hanya menyangkut pada produksi, distribusi, dan ketersediaan pangan ditingkat makro (nasional dan regional), melainkan juga menyangkut aspek mikro seperti aksesibilitas pangan pada tiap-tiap rumah tangga dan individu, serta status gizi anggota rumah tangga miskin (terutama anak dan ibu hamil).

Ketahanan pangan pada tingkat mikro merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pangan nasional. Meskipun telah banyak sekali program yang dikembangkan pemerintah dan pihak swasta untuk meningkatkan ketahanan pangan, namun pada kenyataannya hingga saat ini pun berbagai kalangan masyarakat rentan terkena ancaman kerawanan pangan. Kelompok masyarakat rentan yang paling rawan terancam kurang pangan dan gizi adalah rumah tangga petani yang tinggal di wilayah pedesaan dan terpencil, termasuk tepian hutan (Santoso, Jarot dan Slamet 2006).

Keadaan ancaman pangan juga tercermin pada masyarakat pedesaan yang mendiami wilayah perbatasan negara, yang seringkali berada dalam kondisi serba kesulitan dalam memanfaatkan hasil panen guna untuk pemenuhan ragam kebutuhan

pokok sehari-hari. Fenomena yang terjadi pada masyarakat pedesaan di wilayah perbatasan Entikong, masih belum terpenuhi aspek ini. Dimana masyarakat lokal masih terbatas dalam mengakses sembako (sembilan bahan pokok) yang notabene-nya merupakan sumber utama penghidupan mereka. Terdapat beberapa desa yang tidak memiliki akses jalan darat, hanya melewati sungai. Akses alternatif adalah masyarakat lokal membeli sembako di negara Malaysia. Dalam hal ini negara belum secara merata memenuhi akses pangan bagi masyarakat di pedesaan wilayah perbatasan Entikong.

Kemudian, pola penggunaan lahan yang umum terjadi di kawasan perbatasan Entikong didominasi oleh kawasan lindung. Penggunaan lahan di kawasan ini didominasi oleh tutupan lahan hutan lebat, hutan belukar, permukiman, sawah, semak/ilalang, tegalan/ladang, kebun karet/sawit, dan kebun campuran. Penggunaan lahan paling besar adalah kawasan perkebunan dan pertanian. Melihat usaha masyarakat terhadap SDA yang ada ini, sangat memiliki potensi untuk masyarakat lokal di perbatasan Entikong swasembada pangan. Pemetaan yang dilakukan BNPP (2011) menyebutkan bahwa potensi eksisting di Kecamatan Entikong terdiri atas pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan dan pertambangan, yang sebagian besar sudah dimanfaatkan.

Potensi wilayah perbatasan Entikong ini masih belum dikembangkan secara maksimal karena faktor kemiskinan yang masih membelenggu. Terdapat sekitar 79,56% penduduk miskin di Kalimantan Barat berada di daerah pedesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian. Hal ini berarti masyarakat pedesaan di perbatasan Entikong sebagian besar hidup di garis kemiskinan.

Upaya menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan menjadi suatu hal mendasar dalam pelaksanaan berbagai program pengembangan masyarakat

(*community development*). Hal ini bukan saja karena persoalan ketahanan pangan memiliki keterkaitan erat dengan masalah pemenuhan gizi masyarakat, melainkan juga karena ketahanan pangan merupakan indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini tentu dibarengi dengan penurunan jumlah kemiskinan di pedesaan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Mekanisme pasar yang lebih banyak berkembang selama ini dalam mengelola ketersediaan pangan tidak bisa lagi memberikan solusi bagi semua pihak. tampak jelas bagaimana ketersediaan pangan justru semakin problematis. Dari tingkat pengambil kebijakan hingga petani petani sebagai aktor penjalanan kebijakan. Seharusnya sebagai aktor juga kesejahteraan petani di pedesaan terjamin oleh pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah.

Pada usaha-usaha pencegahan ancaman krisis pangan, penulis meminjam model *development state* yang diungkapkan oleh Keynisan (dalam Winarno, 2014). Model *development state* berkembang cukup baik di negara-negara Asia Timur, dengan melihat hal-hal berikut; *Pertama*, ketersediaan (*availability*). Pertumbuhan populasi di Indonesia semakin tahun semakin bertambah, dan akan diperkirakan mengalami bonus demografi pada tahun 2025 mendatang. Pada kasus beberapa negara seperti china dan india, dilihat dari perspektif ketersediaan pangan, sungguh mengkhawatirkan.

Ketersediaan pangan lokal menjadi orientasi masing-masing negara dalam rangka ketahanan pangan nasional negaranya. Dalam implementasi di lapangan, dibutuhkan upaya sinergis antara pengetahuan, pengembangan teknologi sektor pangan, dengan realisasi riset di lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan transfer informasi mengenai peningkatan kualitas dan kuantitas produk pangan kepada aktor pelaksana, yaitu petani ataupun peternak di pedesaan wilayah perbatasan Entikong. Dengan

adanya sinergi dari semua aktor yang terlibat aspek ketersediaan pangan ini dapat terealisasi, paling tidak untuk persediaan pangan di tingkat keluarga.

Pembinaan sektor pertanian dan peternakan di pedesaan wilayah perbatasan Entikong ini harus selalu di-*up grade* secara terus menerus dengan memaksimalkan peran akademisi untuk mencari terobosan-terobosan baru dalam riset dan pengembangan produk. Sinergisitas dalam akses dan pemetaan data sektoral dapat dilakukan oleh badan ketahanan pangan nasional bersama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Usaha ini difokuskan dalam rangka mencari solusi dan usaha efektif untuk meningkatkan sektor pertanian. Hal ini agar kesiapan lokal dalam menghadapi bencana seperti pemanasan global. Artinya, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan serius pembangunan ekonomi masyarakat lokal melalui sektor pertanian.

Kedua, aksesibilitas (*accessibility*), elemen aksesibilitas dapat dilihat dari keterjangkauan masyarakat terhadap pangan yang layak. Artinya bahwa kesediaan pangan terbuka bagi masyarakat semua golongan. Perlu peran serta pemerintah untuk mengorganisir keterjaminan stabilitas harga pangan, sehingga masyarakat semua lapisan mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam aksesibilitas kebutuhan pangan keluarga mereka masing-masing. Subsidi pangan dan kebijakan yang berpihak pada petani lokal (kecil) dan masyarakat yang berasal dari ekonomi lemah, diperlukan peran pemerintah.

Ketiga, stabilitas (*stability*). Diperlukan integrasi kebijakan pemerintah pada sektor pertanian yang merupakan sektor ekonomi riil, dengan kebijakan ekonomi makro. Dalam rangka menjaga stabilitas produksi nasional dan aksesibilitas masyarakat terhadap pemenuhan pangan, dibutuhkan stabilitas harga pada tiap produk pangan nasional. Hal ini dapat digambarkan dalam eksistensi atau

ketersediaan pangan nasional tiap tahun yang tidak menimbulkan konflik sosial. Terjaganya stabilitas pangan lokal (keluarga), merupakan hal yang penting untuk ketahanan pangan nasional. Dapat dilihat pada masyarakat petani di pedesaan, mereka terus berkelanjutan, meski hasilnya hanya untuk keluarga.

Keempat, keamanan (*safety*). Dalam rangka memenangkan perdagangan bebas, dibutuhkan corak pertanian yang padat teknologi dan berorientasi pasar. Pertanian dan peternakan sepenuhnya didorong untuk dapat memenuhi kualitas dan kuantitas hasil yang berstandar pasar internasional. Hal ini diciptakan agar produk lokal petani dalam negeri memiliki keunggulan komparatif dan posisi tawar yang baik. Untuk itu, pemutakhiran teknologi pertanian dan inovasi lokal perlu didorong, tentunya dibarengi dengan insentif-insentif yang memadai untuk kesejahteraan petani lokal agar mereka memiliki motivasi untuk maju dan berkembang ke depan. Hal ini perlu dilakukan di berbagai daerah pedesaan, tidak hanya di pedesaan yang ada di wilayah perbatasan Entikong saja. Peran pemerintah dan petani serta aktor lain yang merupakan inovator itu sendiri perlu di apresiasi, tentu dengan proses transparansi yang baik.

KESIMPULAN

Pembangunan yang berorientasi pada ketahanan pangan merupakan upaya guna mewujudkan kemandirian pangan di level lokal dan nasional, serta yang terpenting adalah kondisi pangan cukup dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk dalam negeri (Gardjito dan Rauf dalam Lantarsih, dkk., 2011).

Ketersediaan pangan dalam negeri dapat bersumber dari produksi lokal dalam negeri, impor, dan cadangan pangan nasional. Ketersediaan pangan dalam negeri ini semata-mata dalam rangka memenuhi kecukupan pangan. Pengupayaannya yaitu melalui produksi lokal, sedangkan impor

adalah opsi terakhir apabila terjadi kelangkaan pangan yang mendesak. Artinya bahwa penguatan produksi pangan lokal semestinya menjadi prioritas nasional.

Jika pemerintah meneruskan kebijakan impor pangan tanpa meningkatkan keunggulan kompetitif produk pangan nasional, maka akan terjadi berbagai konsekuensi di bidang ketahanan pangan nasional. Satu konsekuensi yang paling berbahaya adalah ketergantungan Indonesia terhadap sektor pertanian negara lain seperti Thailand dan Vietnam, padahal sektor pertanian, perkebunan, serta peternakan di tingkat lokal memiliki potensi baik untuk ketahanan pangan nasional. Kemudian, secara perlahan kebijakan impor akan mematikan usaha pertanian di dalam negeri karena sektor pertanian kemudian akan dilihat sebagai usaha yang tidak lagi menjanjikan. Hal ini akan berakibat pada peralihan tenaga kerja ke sektor-sektor yang lebih menguntungkan. Akibatnya, penderitaan petani kecil akan semakin besar dan kesejahteraan mereka tidak akan pernah tercapai.

Rekomendasi penguatan produksi pangan di tingkat lokal, membutuhkan sinergisitas antara pemerintah (pusat dan daerah), kelembagaan lokal, dan masyarakat lokal untuk turun bersama bukan duduk bersama dalam menangani masalah kerawanan pangan yang kian mengancam negeri ini. Kebijakan-kebijakan yang ada diharapkan dapat adil dalam mensejahterakan petani miskin di pedesaan, bukan memanfaatkan keberadaan mereka untuk menjadi lahan proyek semata

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.* (2019). *Global Hunger Index: the Challenge of Hunger and Climate Change*. Retrieved from: <https://www.globalhungerindex.org/pdf/en/2019.pdf>
- Anonim.* (2019). *World Poverty Clock*. Federal Ministry for Economic Cooperation and Development.

- Retrieved from:
<https://worldpoverty.io/index.html>
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. (2018). *Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2018*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. (2019). *Laporan Kinerja Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Kajian Indikator Lintas Sektor Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Nasional.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Kalimantan Barat dalam Angka*. Pontianak: BPS Kalimantan Barat.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hermanto (2015). Ketahanan Pangan Indonesia Di Kawasan Asean. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 33(1): 19-31.
- Khudori. (2008). *Ironi Negeri Beras*. Insisist Press: Jakarta.
- Lantarsih, R., dkk. (2011). Sistem Ketahanan Pangan Nasional: Kontribusi Ketersediaan Dan Konsumsi Energi Serta Optimalisasi Distribusi Beras. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 9(1): 33-51.
- Lassa, J. (2005). *Politik Ketahanan Pangan Indonesia 1952-2005*. Retrieved from:
https://www.researchgate.net/publication/326146082_Politik_Ketahanan_Pangan_Indonesia_1950-2005/link/5b3b06eb0f7e9b0df5e83d2c/download
- Maxwell. S. (1994). *Food Security: a post-modern Perspective*. Working paper 9 Institute of Development Studies University of Sussex, England.
- Niko, N. (2019). Kemiskinan Perempuan Dayak Benawan di Kalimantan Barat sebagai Bentuk Kolonialisme Baru. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1): 58-76.
- Niko, N., & Samkamaria. (2019). Terminal Barang Internasional (TBI) dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Perbatasan Entikong, Indonesia-Malaysia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 1(2):104-114.
- Prabowo, R. (2010). Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia. *MEDLAGRO: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, 6(2): 62 – 73.
- Santoso, I., Jarot, S., dan Slamet, R. (2006). *Model Pengembangan Hutan Cadangan Pangan Melalui Pendidikan Non Formal untuk Penanganan Kerawanan Pangan Rumah Tangga Petani Tepian Hutan*. Jakarta: Kerja sama Lembaga Penelitian Universitas Jenderal Soedirman dengan Kementrian Negara Riset dan Teknologi Serta LIPI.
- Santoso, Imam. (2014). *Pengembangan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharyanto, H. (2011). Ketahanan Pangan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(2): 186-194.
- Sulaiman, A. A., dkk. (2018). *Sukses Swasembada Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045*. IAARD Press: Jakarta.
- Winarno, B. (2010). *Melawan Gurita Neoliberalisme*. Jakarta: penerbit erlangga.
- Winarno, B. (2014). *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS.